

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis penatausahaan aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dapat disimpulkan bahwa :

1. Penatausahaan aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang yang terdiri dari proses pembukuan, inventarisasi dan pelaporan belum berjalan dengan baik. Faktor-faktor penyebab penatausahaan aset tetap tidak berjalan baik adalah sumber daya manusia yang kurang kompeten, letak geografis yang sulit dijangkau, tidak adanya biaya saat melakukan inventarisasi, teknologi penunjang kegiatan proses penatausahaan, hukum yang kurang dipatuhi oleh pengrus barang. Secara umum faktor-faktor itulah yang menyebabkan penatausahaan aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang tidak berjalan baik.
2. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pengelola aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dalam melakukan penatausahaan aset tetap yang baik adalah melakukan pelatihan kepada pejabat penatausahaan aset daerah untuk meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya penatausahaan aset tetap, mengajukan tambahan biaya untuk melakukan proses inventarisasi, melakukan pendampingan berupa rekonsiliasi dan

memperbaiki sistem administrasi untuk penilaian Badan Pemeriksa Keuangan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Kupang, dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pengelola Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang adalah melakukan penatausahaan aset tetap dengan baik dan benar dengan cara menciptakan sumber daya manusia yang profesional dan memahami manajemen aset dengan baik dan benar, mengkaji setiap rencana kebutuhan dan pemeliharaan aset yang dilaksanakan, melakukan koordinasi yang baik antar SKPD dalam penatausahaan aset, setiap pengurus barang harus melakukan tugas pokok dan fungsi dengan baik dan jujur, mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset daerah, melakukan evaluasi rutin terhadap penggunaan aset, menggunakan aset berdasarkan kepentingan penyelenggara tugas pokok dan fungsi, perlunya standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah, melakukan evaluasi atas temuan BPK dan menindaklanjuti rekomendasi BPK yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kupang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andirans, Ikbar. 2017. *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Menurut Permendagri No.19 Tahun 2016 Kabupaten Jenoponto*. Skripsi. Makassar :Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Febrianti, Sukma. *Analisis Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya*. Jurnal Ekonomi Manajemen. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pontianak.
- Halim,Abdul.2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul & Syam Kusufi, Muhammad. 2017. *Akuntansi Sektor Publik: Akunatansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Harliman. 1998. *Optimalisasi dan Pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Melalui Swastanisasi*. Skripsi. Jakarta. Fakultas Fisip, Universitas Indonesia.
- Kurnianto, Okta. 2017. *Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang*. Skripsi. Makassar : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah*. Salembah Empat. Jakarta.
- Piri, Triski. 2016. *Analisis Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Prov. Sulawesi Utara*. Skripsi. Manado : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi.
- Suradi, 2009. *Akuntansi Pengantar I*; Edisi Pertama. Gava Media. Yogyakarta.
- Saputra, Ardi Rahmawan.2012. *Kajian Penggunaan Informasi Keuangan Daerah*. Accounting Analysis Journal. Universitas Negeri Semarang.
- Sahlan, Muhammad. 2015. *Analisis Permasalahan Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat*. Skripsi. Semarang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Sutri Kilonung, Monika, Ilat, Ventje, dan Pinatik SherLY. 2015. *Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tomohon*. Jurnal EMBA. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.

- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang *Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- _____, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 7 tentang *Akuntansi Aset Tetap*.
- _____, Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.
- _____, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.